



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURSARI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 758640

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 491 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	93.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU SIGRA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
2. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	101.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.645.049
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.201.645.049

III. HUTANG Rp. 111.083.333

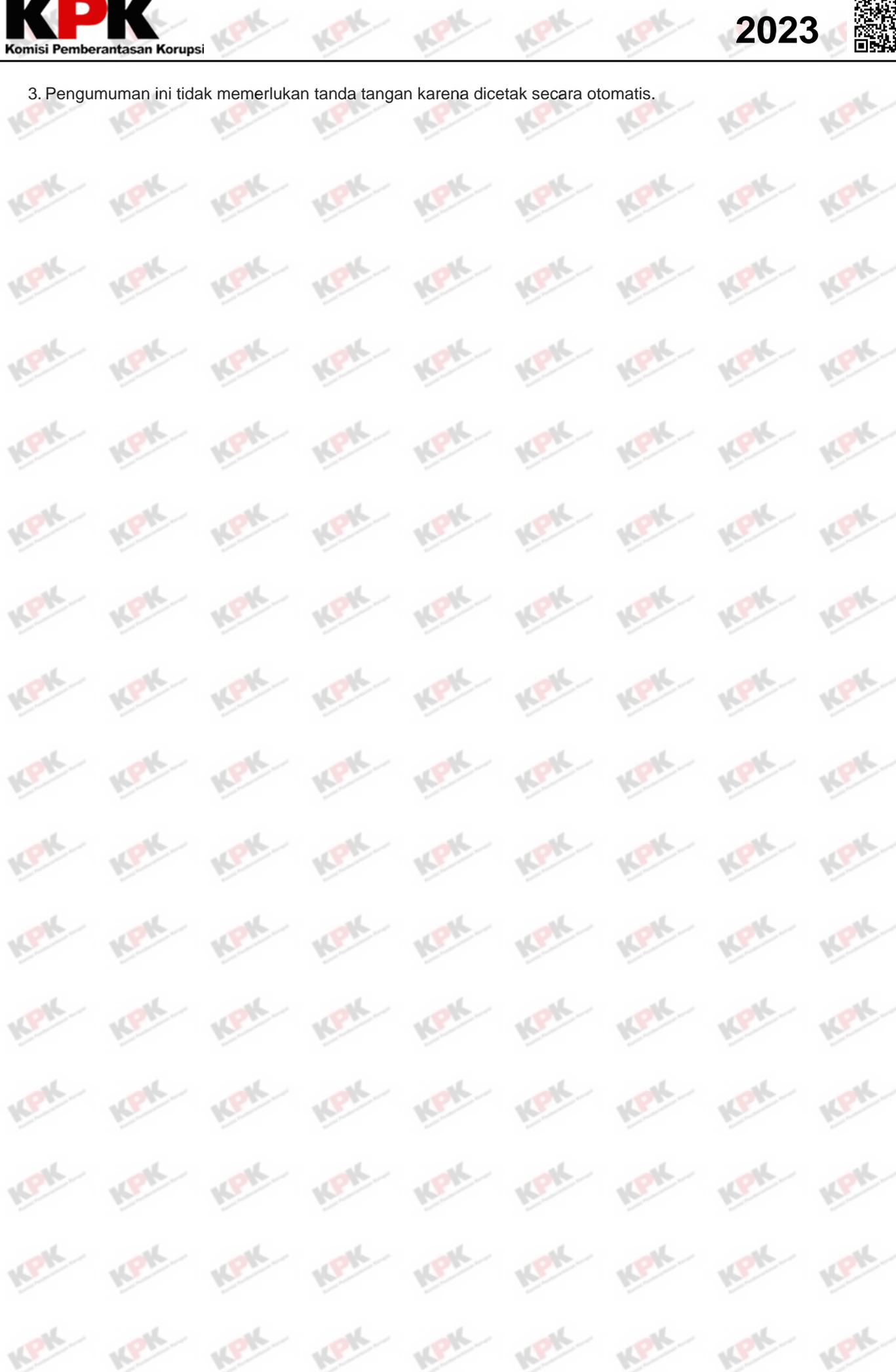
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.090.561.716

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIZKY AGUNG ARIESANTHO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 752448

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.265.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 610 m2/304 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
2. Tanah Seluas 261 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 216 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
4. Tanah Seluas 9800 m2 di KAB / KOTA WAY KANAN, WARISAN Rp. 160.000.000
5. Tanah Seluas 20260 m2 di KAB / KOTA WAY KANAN, WARISAN Rp. 350.000.000
6. Tanah Seluas 11714 m2 di KAB / KOTA WAY KANAN, WARISAN Rp. 190.000.000
7. Tanah Seluas 19385 m2 di KAB / KOTA WAY KANAN, WARISAN Rp. 310.000.000
8. Tanah Seluas 19476 m2 di KAB / KOTA WAY KANAN, WARISAN Rp. 300.000.000
9. Tanah Seluas 791 m2 di KAB / KOTA WAY KANAN, WARISAN Rp. 15.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 255.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1,5 L ULTIMATE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000



2. MOTOR, HONDA XIN02Q43LO A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI

Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 65.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 261.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.846.000.000

III. HUTANG Rp. 77.134.392

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.768.865.608

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIENGE RAHMAN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **742511**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 678 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	290.000.000
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA REBORN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	181.600.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	150.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.121.600.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.121.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

- Nama : RUDHY HARTONO
- Jabatan : KEPALA BIDANG
- NHK : 727139

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 650.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 142.000.000

- MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
- MOBIL, HONDA CRV 2008 Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
- MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 57.700.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 68.997

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 849.768.997

III. HUTANG Rp. 177.925.919

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 671.843.078

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

- Nama : FACHRIZAL
- Jabatan : KEPALA BIDANG
- NHK : 898227

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 252.000.000

- MOTOR, HONDA A1F02N36M1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
- MOBIL, DAIHATSU F651RV-GMDFJ Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
- MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 112.900.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 28.608.225

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.293.508.225

III. HUTANG Rp. 16.798.719

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.276.709.506

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.